

**PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN ALOKASI
BELANJA DAERAH TERHADAP IPM**

(STUDI KASUS KABUPATEN OKI PERIODE TAHUN 2011-2020)



Skripsi Oleh:

MELA ANJANI

01021381823134

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

KEMENTRIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN ALOKASI BELANJA
DAERAH TERHADAP IPM

(STUDI KASUS KABUPATEN OKI PERIODE TAHUN 2011-2020)

Disusun Oleh,


Nama : Mela Anjani
NIM : 01021381823134
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif:


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 12 Januari 2023


Ketua : Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
NIP. 196812241993031002

Tanggal 3 Januari 2023


Anggota : Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN ALOKASI BELANJA

DAERAH TERHADAP IPM

(STUDI KASUS KABUPATEN OKI PERIODE TAHUN 2011-2020)

Disusun Oleh:

Nama : Mela Anjani
NIM : 01021381823134
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 16 Maret 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 30 Maret 2023

Ketua



Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
NIP. 196812241993031002

Anggota



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Anggota



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI

BUREAU PEMBANGUNAN 19-2023
FACULTY OF ECONOMICS



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mela Anjani
NIM : 01021381823134
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul

**Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Daerah Terhadap IPM
(Studi Kasus Kabupaten OKI Periode Tahun 2011-2020)**

Pebimbing :

Ketua : Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
Anggota : Dr.Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 16 Maret 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya, demikianlah pernyataan ini saya buat sebelumnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 12 April 2023
Pembuat pernyataan,

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN A-4-2023
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS



Mela Anjani
NIM. 01021381823134

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Barang siapa yang mengerjakan
kebaikan sekecil apapun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya”

(QS Al Zalzalah: 7)

Banyak kegagalan dalam hidup ini
dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa
dekatnya mereka dengan keberhasilan
saat mereka menyerah.”

– Thomas Alfa Edison

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua ku
- Kakakku
- Adikku
- Teman-temanku
- Keluarga Besarku
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala kelimpahan rahmat dan ridha yang ia berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Daerah Terhadap IPM (Studi Kasus Kabupaten OKI Periode Tahun 2011-2020) ini dengan baik. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang datanya diperoleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kekurangan dalam skripsi ini penulis harap dapat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun maupun mengarahkan bagi skripsi ini. Akhir kata penulis harap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam skripsi ini.

Palembang, 12 April 2023

Penulis,



Mela Anjani

NIM. 01021381823134

UCAPAN TERIMA KASIH

Hambatan dan kendala yang dihadapi penulis dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Isnurhadi, S.E., M.B.A., Ph.D.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Dr. Suhel, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Bapak **Dr. Sukanto, S.E., M.Si.** selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Bapak **Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si.** selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si.** selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penelitian dan penyusunan skripsi saya sehingga skripsi ini selesai.

10. Ibu **Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si.** selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penelitian dan penyusunan skripsi saya sehingga skripsi ini selesai.
11. Ibu **Feny Marissa, S.E., M.Si.** selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran terhadap proses penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak **Drs. Muhammad Teguh, M.Si.** selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.
13. Seluruh Dosen Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya.
14. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
15. Untuk diri saya sendiri yang telah bangkit melawan semua rasa kemalasan yang tiba-tiba datang, hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kedua orang tua saya, Bapak Sungkono dan Ibu Sumiatun yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
17. Kedua saudara saya, Cely Indriyani dan Muhamad Bashij Rizqullah yang selalu menyemangati dan mendukung saya.
18. Seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan Unsri 2018 yang telah menemani masa perkuliahan saya.

Palembang, 12 April 2023

Penulis,



Mela Anjani

NIM. 01021381823134

ABSTRAK

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN ALOKASI BELANJA DAERAH TERHADAP IPM

(STUDI KASUS KABUPATEN OKI PERIODE TAHUN 2011-2020)

Oleh:

Mela Anjani; Taufiq; Anna Yulianita

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Daerah Terhadap IPM (Studi Kasus Kabupaten OKI Periode Tahun 2011-2020). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk *time series*. Diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan periode tahun 2011-2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan kemandirian keuangan daerah dan alokasi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten OKI. Secara parsial, variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten OKI periode tahun 2011-2020. Dan variabel alokasi belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten OKI periode tahun 2011-2020.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Alokasi Belanja Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia

Ketua



Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
NIP. 196812241993031002

Anggota



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP.197304062010121001

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE AND REGIONAL EXPENDITURE ALLOCATION ON HDI (CASE STUDY OF OKI REGENCY FOR THE PERIOD OF 2011-2020)

by:

Mela Anjani; Taufiq; Anna Yulianita

This study aims to analyze the effect of regional financial independence and regional expenditure allocation on HDI (Case Study of OKI Regency for the period of 2011-2020). This study used secondary data in the form of time series obtained from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance for the period of 2011-2020. This study used descriptive analysis methods and multiple linear regression analysis. The results of multiple linear regression showed that regional financial independence and regional expenditure allocation had a significant effect on the human development index simultaneously, the regional financial independence variable had a negative and insignificant effect partially on the human development index, and the regional expenditure allocation variable had a positive and significant effect on the human development index in OKI Regency for the period of 2011-2020.

Key words: Regional Financial Independence, Regional Expenditure Allocation, and Human Development Index

Advisor I



Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
NIP. 196812241993031002

Advisor II



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Approved by,
Head of Development Economics Program



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP.197304062010121001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa :

Nama : Mela Anjani
NIM : 01021381823134
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Mata Kuliah : Keuangan Daerah
Judul Skripsi : Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Daerah Terhadap IPM (Studi Kasus Kabupaten OKI Periode Tahun 2011-2020)

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk di tempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, April 2023

Ketua



(Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si)
NIP. 196812241993031002

Anggota



(Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si)
NIP. 197007162008012015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



(Dr. Mukhlis, S.E., M.Si)
NIP.197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mela Anjani

NIM : 01021381823134

TTL : Tanjung Enim, 21 Mei 2000

Agama : Islam

Alamat : Jln. Kartowarsono Tegal Rejo RT 06

No. Handphone : 0895604983257

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Email : Melaanjani59@gmail.com

Pendidikan Formal

2006 – 2012 : SD N 19 Tanjung Enim

2012 – 2015 : SMP N 2 Lawang Kidul

2015 – 2018 : SMA Bukit Asam

2018 – 2023 : S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Studi Pustaka.....	17
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia.....	19
2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah	21
2.1.4 Alokasi Belanja Daerah	23
2.2. Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pikir	28
2.4 Hipotesis Penelitian	29

BAB III.....	30
METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	30
3.2 Data dan Sumber Data	30
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4 Metode Analisis Data.....	31
3.4.1 Analisis Deskriptif	31
3.4.2 Analisis Regresi Sederhana.....	31
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.4.4 Pengujian Hipotesis.....	34
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	36
BAB IV.....	38
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum.....	38
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten OKI.....	38
4.1.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	39
4.1.3 Keadaan Perekonomian Kabupaten OKI	41
4.1.4 PDRB Perkapita Kabupaten OKI.....	45
4.1.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten OKI.....	47
4.1.6 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten OKI.....	49
4.1.7 Alokasi Belanja Daerah Kabupaten OKI	51
4.2 Hasil Regresi Linier Berganda.....	53
4.2.1 Uji Hpotesis	53
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.3 Pembahasan.....	60
4.3.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja.....	60
Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	60
4.3.2 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks	61
4.3.3 Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan	63
BAB V.....	67
KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan	67

5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020 (Persen).....	4
Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020 (Jutaan Rupiah)	7
Tabel 1.3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020 (Jutaan Rupiah)	10
Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten OKI Tahun 2016-2020 (Persen)	13
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten OKI Tahun 2016-2020 Menurut Kelompok Umur (Jiwa)	40
Tabel 4.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten OKI Tahun 2018-2020 (Jutaan Rupiah).....	42
Tabel 4.3 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku Kabupaten OKI Tahun 2016-2020 (Persen).....	44
Tabel 4.4 PDRB Perkapita Kabupaten OKI Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)	46
Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten OKI Tahun 2011-2020 (Persen) ...	48
Tabel 4.6 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten OKI Periode Tahun 2011-2020 (Jutaan Rupiah)	50
Tabel 4.7 Alokasi Belanja Daerah Kabupaten OKI Periode Tahun 2011-2020 (Persen) .	52
Tabel 4.8 Hasil Regresi.....	53
Tabel 4.9 Hasil Uji F-Statistik	55
Tabel 4.10 Hasil Uji t-Statistic.....	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	58
Tabel 4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	58
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Regresi Model	75
Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas	75
Lampiran 3 Hasil Uji Autokorelasi	76
Lampiran 4 Hasil Uji Heterokedastisitas	76
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan suatu negara pada dasarnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat, membangun perekonomian yang makmur dan sejahtera, melakukan berbagai kerja sama dengan negara maju, hal ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh negara lainnya. Indonesia pun tidak ketinggalan dengan melakukan kesejahteraan, melalui berbagai kebijakan otonomi daerah yang nantinya pemerintah akan terus melakukan berbagai kewenangan hingga tercapainya satu tujuan. Otonomi daerah pada dasarnya yakni penyerahan atas wewenang aktivitas pemerintahan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah wilayah otonomi hal tersebut disebutkan pada UU nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah dengan hal ini dapat leluasa membuat keputusan maupun kebijakan bagi daerahnya (Kamaroellah, 2017).

Otonomi daerah Indonesia dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat lebih memerhatikan masyarakatnya, dengan diberikan kewenangan tersebut pemerintah daerah lebih efisien dalam menampung berbagai aspirasi masyarakat hingga dalam membentuk strategi pembangunan akan lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ristanti (2017) otonomi daerah diharapkan mementingkan kualitas pelayanan bagi masyarakat sehingga di masa yang akan datang kemakmuran dapat lebih terjamin.

Indonesia melaksanakan otonomi daerah dengan maksud agar sektor publik dapat menjadi tumpuan dalam menaikkan kemampuan, daya guna serta responsibilitas. Masing-masing daerah telah mendapat bantuan dari pemerintah pusat, namun dengan adanya otonomi daerah ini daerah dituntut agar menemukan berbagai macam alternatif pemasukan lainnya. Agar dapat memanfaatkan dana publik berdasar kepentingan dan juga aspirasi masyarakat. Kontribusi investasi dari swasta dan berbagai perusahaan milik daerah dapat menjadi pemicu penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (Christia et al, 2019).

Implikasi otonomi daerah menyerahkan berbagai wewenang kepada pemerintahan daerah selama mengurus serta mengendalikan bermacam perihal yang berkaitan dengan daerahnya. Salah satu wewenang yang sangat wajib bagi pemerintah daerah juga ialah mengelola finansial daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan, dapat efektif dan efisien, serta bertanggung jawab dengan mementingkan beberapa aspek keadilan bagi seluruh masyarakat (Tonu et al, 2015).

Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu yang ikut menggunakan implikasi otonomi daerah ini. Karena pada dasarnya otonomi daerah dilaksanakan dengan mementingkan asas yaitu, semua warga negara memiliki hak yang sama, pengambilan keputusan dilakukan dengan adil, pengakuan atas segala potensi yang dimiliki, dan berbagai keragaman yang terdapat di daerah (Hidayat, 2017).

Diberikannya keleluasan terhadap pemerintah dalam mengatur keuangan daerah, dalam hal ini pemerintah Sumatera Selatan melakukan tindakan agar dapat

menaikkan penerimaan bagi daerah sebagai wujud dari pertanggung jawaban terhadap masyarakat. Peningkatan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah ini nantinya akan digunakan dalam memenuhi berbagai kebutuhan daerah. Semakin berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka daerah dapat dikatakan telah mampu serta berhasil dalam melakukan peningkatan pendapatan daerahnya (Suci dan Asmara, 2014).

Meningkatnya pendapatan daerah maka akan pula menaikkan anggaran bagi belanja daerah. Dengan kenaikan belanja bagi daerah maka pemerintah akan lebih memusatkannya terhadap peningkatan sarana maupun prasarana baik secara ekonomi maupun fasilitas umum. Peningkatan sarana dan prasarana ini akan berdampak pada terciptanya berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah. Kemudian secara tidak sadar akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakatnya (Swandewi, 2014). Dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini akan tampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan ini akan menyebabkan perkembangan wilayah yang harus selalu dihadapi walaupun nantinya permasalahan akan selalu timbul. Salah satu model perkembangan yang saat ini tengah berkembang ialah pertumbuhan ekonomi dimana dalam pengukurannya menggunakan indeks pembangunan manusia. Dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dibawah ini selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020 (Persen)

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ogan Komering Ulu	67,47	68,28	69,01	69,45	69,32
Ogan Komering Ilir	65,44	66,11	66,57	66,96	66,82
Muara Enim	66,71	67,63	68,28	68,88	68,74
Lahat	65,75	66,38	66,99	67,62	67,44
Musi Rawas	64,75	65,31	66,18	66,92	66,79
Musi Banyuasin	66,45	66,96	67,57	67,83	67,69
Banyuasin	65,01	65,85	66,40	66,90	66,74
Ogan Komering Ulu Selatan	63,42	63,96	64,84	65,43	65,30
Ogan Komering Ulu Timur	67,38	67,84	68,58	69,34	69,28
Ogan Ilir	65,45	65,63	66,43	67,22	67,06
Empat Lawang	64,00	64,21	64,81	65,10	65,25
Pali	61,66	62,58	63,49	64,33	64,70
Musi Rawas Utara	63,05	63,18	63,75	64,32	64,49
Palembang	76,59	77,22	77,89	78,44	78,33
Prabumulih	73,38	73,58	74,04	74,40	74,55
Pagar Alam	65,96	66,81	67,62	68,44	68,31
Lubuk Linggau	73,57	73,67	74,09	74,81	74,78
Sumatera Selatan	68,42	68,86	69,39	70,02	70,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Dilihat pada Tabel 1.1, menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi kenaikan secara signifikan terhadap IPM Provinsi Sumatera Selatan periode 2016-2020. Hal ini dibuktikan dengan angka IPM pada Tahun 2020 mencapai 70,01 persen, ini termasuk kategori tinggi pada Indeks Pembangunan Manusia. Selama sepuluh tahun terakhir ini IPM Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai salah satu provinsi dengan status tinggi. Kenaikan ini disertai juga dengan Kabupaten/Kota lainnya, seperti contohnya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Kabupaten OKI merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum kinerja keuangan daerah Kabupaten OKI telah membaik dari tahun ke tahunnya

sedangkan untuk pembangunan manusia Kabupaten OKI masih tergolong dalam tingkatan sedang dalam Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana kaitannya kinerja keuangan dan alokasi belanja daerah terhadap pembangunan manusia yang tergolong sedang di Kabupaten OKI tersebut. Apakah pembangunan manusia pada Kabupaten OKI telah disebut layak pada Provinsi Sumatera Selatan.

Sepanjang periode Tahun 2016-2020 Kabupaten OKI mengalami kemajuan yang pesat tiap tahunnya. Pertumbuhan IPM sepuluh tahun terakhir berkisar antara 0,89 persen. Indeks Pembangunan Manusia jika berdasarkan data BPS pada tahun 2020 untuk Kabupaten OKI yaitu berkisar 66,82, angka ini lebih tinggi dari Kabupaten Pali dan juga Musi Rawas Utara. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Muara Enim, Kabupaten OKI masih terbilang rendah. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah sehingga mulai menjalankan berbagai rencana yang nantinya dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia Kabupaten OKI.

Peningkatan indeks pembangunan manusia yang menjadi salah satu tolak ukurnya ialah pendapatan. Hal tersebut dikarenakan IPM berkaitan terhadap kesanggupan pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakatnya. Pendapatan yang dimaksud dalam ini berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah ini bersumber dari berbagai hal seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Sejalan pada otonomi bagi daerah pemerintah mulai membenahi terhadap hal pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik. Hal ini dapat diukur melalui analisis rasio keuangan. Dengan pengelolaan keuangan

daerah yang efektif ini akan berdampak pada target dan realisasi penerimaan suatu daerah.

Apabila pengelolaan keuangan di suatu daerah telah dikatakan efisien dan efektif maka akan terjamin dalam hal ketersediaan dana pembangunan, sehingga tidak diragukan lagi kemandirian pada daerah tersebut. Indikator dalam penentuan tingkat kemandirian suatu daerah ada banyak, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satunya. Dapat diartikan kian bertambahnya penerimaan pendapatan asli daerah terhadap keseluruhan anggaran APBD, sehingga akan semakin menunjukkan bahwa daerah tersebut mandiri dalam hal biaya pembangunan daerahnya. Berikut Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020 (Jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	PAD Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ogan Komerling Ulu	104.632.393	81.066.359	159.534.222	124.996.326	160.910.882
Ogan Komerling Ilir Muara Enim	332.007.159	309.041.993	356.429.245	190.197.171	290.303.808
Lahat	167.904.592	161.959.611	171.691.414	227.483.295	251.892.475
Musi Rawas	97.733.313	134.434.441	121.765.768	111.165.768	119.670.768
Musi Banyuasin	105.070.861	115.000.000	121.862.955	140.435.954	154.244.636
Banyuasin	229.005.396	203.693.548	212.733.644	287.089.027	338.792.835
Banyuasin	94.171.399	107.759.159	110.633.838	137.051.490	184.000.411
Ogan Komerling Ilir Selatan	41.160.000	42.495.000	41.950.500	47.423.500	66.233.819
Ogan Komerling Ilir Timur	53.116.781	64.785.581	73.129.729	90.524.777	107.866.679
Ogan Ilir Empat	170.505.159	283.501.664	203.562.236	113.830.663	179.192.297
Lawang	31.470.587	35.332.587	42.061.237	52.348.232	56.561.822
Pali	32.898.492	56.924.053	82.956.713	93.629.781	114.458.107
Musi Rawas Utara	26.428.531	34.120.458	35.659.028	54.630.672	56.214.544
Palembang	777.398.881	894.010.466	1.055.615.407	1.652.647.400	1.844.718.837
Prabumulih	89.087.000	104.330.028	114.058.001	96.498.000	105.670.425
Pagar Alam	50.114.157	52.126.072	62.107.055	44.411.347	65.337.501
Lubuk Linggau	77.465.291	82.747.948	114.914.956	92.050.000	98.035.966
Sumatera Selatan	2.733.329.640	3.016.085.363	3.607.819.114	3.329.244.877	4.051.157.668

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Pada Tabel 1.2 yang disajikan di atas bisa diamati bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan mengalami kenaikan secara signifikan setiap tahunnya. Dari tahun 2016-2020 PAD sumsel mendapat peningkatan sebanyak 10 persen. Peningkatan tersebut merupakan salah satu wujud baik bagi Provinsi Sumatera Selatan yang berarti maka pemahaman masyarakat akan pembangunan

daerah semakin tinggi baik dari sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2020 ini sendiri penerimaan PAD Sumatera Selatan telah mencapai 53 persen.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKI dapat dilihat pada tabel sepanjang tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten OKI telah melebihi target, yakni tercapai hingga Rp. 2,47 triliun atau sebesar 102,31 persen, dari target yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp. 2,42 triliun. Pendapatan daerah ini tidak hanya berasal dari pendapatan asli daerah, namun juga berasal dari dana perimbangan dan juga pendapatan lain yang sah. Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten OKI mulai melakukan program yang diberi nama RPJMD atau biasa disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana tersebut dimaksudkan agar dapat dipakai hingga tahun 2024.

Besarnya potensi pendapatan asli daerah ini juga akan berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Belanja daerah sendiri merupakan pengalokasian dana dimana dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien, agar nantinya ini dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Meningkatnya pengalokasian belanja daerah terutama dalam bidang publik seperti di bidang kesehatan dan pendidikan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini berkaitan dengan pembangunan manusia (Amalia dan Purbadharmaja, 2014).

Belanja daerah juga merupakan salah satu biaya yang dikeluarkan dari pemerintah daerah yang digunakan dalam melangsungkan urusan pemerintah serta

ini menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan bentuk asas desentralisasi. Besaran nominal dalam belanja ini nantinya meningkatkan spekulasi dalam pengeluaran pemerintah daerah, sehingga merespon perubahan transfer secara seimbang dan juga selaras. Belanja daerah ini pada dasarnya merupakan salah satu faktor dimana kaitannya atas beberapa sumber seperti pembiayaan daerah, baik merupakan penerimaan sendiri ataupun pemerintah pusat (Sasana, 2011).

Pengelolaan dalam keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila pemerintah tersebut lebih mementingkan belanja publik dalam pengalokasian anggarannya terhadap kepentingan masyarakat. Dilihat dari alokasi belanja pemerintah pengalokasian terhadap publik masih dikategorikan rendah, karena alokasi terhadap belanja rutin lebih diutamakan. Seharusnya dalam hal pembangunan daerah belanja publik merupakan faktor terbesar dalam pelaksanaannya (Astri et al, 2013). Di bawah ini data realisasi belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020:

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020 (Jutaan Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Realisasi Belanja Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ogan Koming					
Ulu	1.160.526.144	1.381.958.362	760.512.363	1.554.158.811	1.593.574.707
Ogan Koming					
Iilir	1.979.334.457	2.108.707.776	1.918.481.264	2.369.154.292	2.641.937.247
Muara Enim	2.114.999.332	2.250.529.365	1.248.573.316	2.992.193.667	2.648.594.396
Lahat	1.798.753.635	1.760.995.603	1.154.747.529	2.017.843.694	2.042.838.727
Musi Rawas	1.526.168.542	1.342.247.690	837.705.439	1.870.283.441	1.715.134.484
Musi					
Banyuasin	2.625.127.073	2.619.480.026	1.252.566.396	3.647.212.439	3.280.012.719
Banyuasin	1.841.970.608	1.965.798.487	1.191.062.354	2.424.700.452	2.439.267.393
Ogan Koming					
Iilir Selatan	1.190.079.830	1.167.165.059	623.056.440	1.437.166.894	1.474.649.050
Ogan Koming					
Iilir Timur	1.517.697.966	1.582.392.014	997.644.838	1.977.249.387	1.835.870.780
Ogan Iilir	1.102.973.684	1.355.054.713	779.503.738	1.573.955.101	1.673.563.868
Empat					
Lawang	778.394.497	891.225.884	461.865.103	1.051.261.964	1.102.392.038
Pali	805.158.530	958.608.706	341.871.187	1.597.609.676	1.421.336.575
Musi Rawas					
Utara	720.301.759	726.662.732	285.888.750	1.067.473.094	1.126.213.917
Palembang	2.915.966.126	3.141.848.659	1.577.065.170	3.968.206.721	4.679.521.118
Prabumulih	891.296.683	865.157.189	393.555.885	1.176.142.036	1.028.921.334
Pagar Alam	798.330.318	743.588.153	326.572.260	810.513.323	741.302.071
Lubuk					
Linggau	809.943.067	871.199.390	440.522.609	944.032.235	984.357.610
Sumatera Selatan	4.962.572.331	6.409.386.593	5.028.800.192	9.618.074.514	10.541.651.135

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Pada Tabel 1.3 realisasi belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pemerintah daerah telah merealisasikan anggaran belanja ke masyarakat dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, dari tahun 2017 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 4.962.572.331 kemudian naik mencapai Rp.

10.541.651.135. Kenaikan ini sebesar 20,7 persen. Untuk Kota Palembang sendiri realisasi belanja daerah pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan di tahun 2018 yaitu menjadi sebesar Rp. 1.577.065.170, yang awalnya dari Rp. 3.141.848.659 pada tahun 2017. Untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan, kenaikan ini sebesar 12,6 persen.

Realisasi belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 telah mencapai sejumlah 31,7 persen, realisasi ini menfokuskan pada pembahasan untuk merealokasi akan adanya wabah Corona yang tengah mewabah. Sehingga pemerintah daerah telah melakukan berbagai pertimbangan skala prioritas berbagai macam dana antisipasi untuk tetap melakukan segala kegiatan ekonomi tanpa adanya terhambat dari apapun. Besaran dalam mengantisipasi wabah tersebut menyesuaikan dengan segala kondisi dan ketidakstabilan dari perkembangan wabah Corona tersebut.

Realisasi belanja pemerintah di Kabupaten OKI sepanjang tahun tersebut terus mengalami kenaikan, dimana kenaikan ini sebesar 7,49 persen. Namun bila dilihat lebih seksama pada tabel realisasi belanja daerah, untuk tahun 2018 realisasi belanja daerah mengalami penurunan. Penurunan realisasi belanja daerah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.981.481.264 atau 84,62 persen dari anggaran, ini dikarenakan adanya perubahan APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten OKI baik dalam hal penambahan nilai anggaran pendapatan dan belanja dan pergeseran nilai antar jenis belanja daerah. Penambahan dan pergeseran tersebut ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD karena

penambahan dan perpindahan meliputi perpindahan antar OPD, kegiatan, dan jenis belanja.

Belanja daerah yang telah digunakan sebelumnya akan dikelola untuk mengetahui apakah ada keseimbangan yang terdapat di belanja tersebut hal ini disebut sebagai keserasian belanja. Seluruh hasil belanja daerah tersebut akan menunjukkan keseimbangan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dikelola satu tahun terakhir, dalam keserasian belanja ini juga mampu memperlihatkan ada atau tidaknya kesamaan terhadap pengelolaan dana daerah yang dimiliki (Abdal et al, 2018). Dalam hal ini apabila hasil yang keluar tidak sesuai dengan target pemerintah maka pemerintah akan mulai melakukan pembenahan untuk target selanjutnya.

Pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap rencana belanja daerah akan mementingkan otoritas pembangunan yang nantinya dapat menciptakan berbagai kondisi yang kondusif bagi masyarakat. Dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut. Pengalokasian belanja daerah memiliki tujuan menaikkan jalannya kegiatan ekonomi dan meningkatkan berbagai fasilitas publik.

Berikut disajikan data laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten OKI Tahun 2016-2020.

Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten OKI Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,58	2,79	3,52	0,93
Pertambangan dan Penggalian	7,33	8,54	15,36	12,04	2,24
Industri Pengolahan	10,86	12,08	16,00	10,34	2,88
Pengadaan Listrik dan Gas	17,23	4,90	5,18	7,38	6,22
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,49	4,08	7,98	8,92	0,30
Konstruksi	9,40	9,64	6,02	7,37	0,58
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,82	9,65	10,55	8,67	6,24
Transportasi dan Pergudangan	8,76	10,50	9,71	8,87	1,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,97	11,48	11,57	7,11	4,76
Informasi dan Komunikasi	11,43	11,51	9,50	11,94	6,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,36	2,71	0,86	0,36	1,30
Real Estate	11,53	9,01	8,02	8,95	2,14
Jasa Perusahaan	8,65	9,55	8,13	9,53	1,23
Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,08	11,05	3,01	1,87	1,09
Jasa Pendidikan	4,30	2,32	4,04	5,35	3,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	3,31	2,51	6,52	3,24
Jasa Lainnya	7,25	9,24	8,02	10,31	2,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,47	5,11	4,94	5,08	3,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten OKI

Jika dilihat pada Tabel 1.4 laju pertumbuhan Kabupaten OKI mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ini selama 5 tahun terakhir sebesar -19,82 persen. Bukan hanya dari sektor industri saja, sektor lain seperti sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta masih banyak sektor lainnya. Masing-masing sektor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar – 28,24 persen, -23,60 persen, dan -14,76 persen.

Perekonomian masyarakat di Kabupaten OKI selama 5 tahun terakhir ini telah berdampak baik bagi pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan. Sumbangan pertumbuhan dari Kabupaten OKI relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota di Sumatera Selatan lainnya. Pertumbuhan ini banyak disumbang oleh sektor pertanian, Kabupaten OKI sendiri merupakan salah satu kabupaten dengan produktifitas petani padi tertinggi di Sumsel.

Pemerintah daerah pun mulai melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan produktifitas pertanian dengan memperluas lahan pertanian dan disesuaikan dengan teknologi canggih yang dapat mempermudah pekerjaan petani. Pemerintah melalui program yang dibuatnya yaitu program serasi , melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan lahan rawa yang sebelumnya dibiarkan terbengkalai menjadi lahan sawah yang lebih produktif.

Sektor pertanian Kabupaten OKI menjadi sektor unggulan. Sehingga sektor ini menjadi prioritas bagi pemerintah untuk dapat terus dikembangkan. Sektor ini nantinya dapat menjadi salah satu penunjang penting dalam perkembangan sektor-sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor-sektor lainnya. Maka Kabupaten OKI menjadi salah satu daerah yang memiliki potensial dengan sektor unggulannya, diharapkan pemerintah dapat lebih mengelola dan menggali potensi yang menjadi sumber pendapatan di Kabupaten OKI (Yulianita, 2009).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah: Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah dan alokasi belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode Tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat ditentukan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh kemandirian keuangan daerah dan alokasi belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode Tahun 2011-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menjadi materi referensi dan kajian bagi penelitian yang lebih dalam dan kompleks lagi terhadap kesejahteraan kemampuan yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan pembangunan untuk tahun berikutnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Menjadi objek bacaan untuk pelajar ataupun mahasiswa yang ingin mengetahui efektivitas kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu alat untuk memperbanyak pengetahuan dan juga pengalaman bagi peneliti dalam halnya penerapan atas masalah yang dihadapi secara nyata nantinya dan menjadi pedoman dalam penelitian selanjutnya sebagai salah satu penambah wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, Herabudin, & Saodah, S. (2018). Analisis Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(2), 87–95.
- Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. B. P. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ep Unud*, 3(6), 257–264.
- Arif, M., & Arza, F. I. (2019). Analisis Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 35–49. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.54>
- Arisman. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 113–122. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v7i1.6756>
- Asmara, A., & Suci, S. C. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1), 41–53.
- Astri, M., Nikensar, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 77–102. <http://www.jpeb.net>
- Bahri, F. (2011). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 51–60.
- BPS. (2012). *Badan Pusat Statistik*. CV Aprilia. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten humbang hasundutan* (B. Kabupaten Humbang Hasundutan (ed.)). Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (BPS), B. P. S. (2021). *Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka 2021*. <https://okikab.bps.go.id>
- Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 23–32.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>

- Darwanto; Yustikasari, Y. (n.d.). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Dewi, P. A. K., & Sutrisna, I. K. (2015). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), 32–40.
- Digdowiseiso, Kumba., & Satrio, Muhammad Bahtiar.(2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 4(3). 2622-2205
- Dwirandra, A. A. N. B. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Keserasian Belanja Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 66–74.
- Enceng, Liestyodono B Irianto & Purwaningdyah MW. (2012). Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 1-73. jiana.ejournal.unri.ac.id
- Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial Independence Of Regencies and Cities in Central Java. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 199–209. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art9>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas DIponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hanifa, Riri., Amalia, Vera. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(1), 34-48
- Harliyani, Eka Maerisca & Haryadi. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 2338-4603
- Hermawati, L., Susetyo, D., Azwardi, & Yulianita, A. (2022). Direct Effects of Village Fund Program on the Human Development Index, and Its Implications on Poverty Level. *Proceedings of the 7th Sriwijaya Economics*,

Accounting, and Business Conference (SEABC 2021), 647(Seabc 2021), 94–99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220304.012>

Hidayat, R. (2017). Political Devolution: Lessons From a Decentralized Mode Of Government In Indonesia. *SAGE Open*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/2158244016686812>

Indonesia. (1999). *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Pusat.

Indonesia. (2004a). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Pusat.

Indonesia. (2004b). *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Pemerintah Pusat.

Indonesia. (2005). *Peraturan Pemrintah (PP) Lembaran Negara RI Tahun Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah*.

Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Kaloh, J. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. PT Rineka Cipta.

Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>

Kamilia, Firly Dwitya., Widiastuti Tika. (2016). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Periode 2011 Hingga 2013 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(5), 359-374

Kemampuan, A., Daerah, K., Kemandirian, T., & Palembang, K. (n.d.). *V* ;,.

Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah* (T. U. Press (ed.)). UB Press.

Koranti, K., Kencanawati, M. S., & Sagitas, E. D. (2015). Analysis of Determinant Regional Expenditure Allocation In The Autonomy Era In Sumatra. *Proceeding of 1st Unnes International Conference on Research Innovation & Commercialization for the Better Life 2015*, 119–123. conf.unnes.ac.id/index.php/uicric

Kurniawan, I., Murtala, M., & Juanda, R. (2020). Efisiensi Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Secara Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 15–22. https://ojs.unimal.ac.id/ekonomi_regional/article/view/3858

- Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 44–55. <https://doi.org/10.33772/jpeb.v1i2.1801>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI.
- Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 116–121. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p116-121>
- Mutiah. (2019). The Effect of Regional Financial Independence, Regional Financial Efficiency and Effectiveness of Regional Original Income on Capital Expenditure (Study in the Provincial Level Regional Government in Indonesia 2013-2017). *European Journal of Business and Management*, 11(24), 43–53. <https://doi.org/10.7176/EJBM>
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Nawawi, A. (2021). Analisis Respon Belanja APBD Terhadap Transfer Tidak Bersyarat dari Pemerintah Pusat: Studi Kasus Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1), 40–55. <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- P, N. F. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Palembang Terhadap Kemandirian Kota Palembang. *Economic*.
- Priambodo, Anugrah. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013).
- Qisthina, F. A., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2019). *Analysis of Regional Financial Independence Towards Economic Growth and Human Development Index (Case Study : SWP Gerbangkertasusila Plus)*. 22(1), 47–51.
- Qisthina, F. A., Khusaini, M., Wahyudi, S. T., Ekonomi, M., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2019). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Plus) IPM*. 1(1), 47–51.

- Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Ekonomi Pembangunan*, 14(1). <https://media.neliti.com/media/publications/90744-ID-analisis-kemandirian-dan-efektivitas-keu.pdf>
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 18(1), 46–58.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26. Uny.ac.id
- Sriningsih, S., Ismiwati, B., & Sayuti, M. (2021). Analisis Keserasian Belanja Modal Dan Belanja Operasional Pada Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen*, 7(1), 39–55. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/kompetitif/article/view/352>
- Statistik, B. P. (2013). Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Triwulan Tahun 2013. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 53, Issue 9).
- Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 8–22.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS* (1st ed.). Andi.
- Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(7), 356–376. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/8217/7293>
- Syaiful. (2006). Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi*, 1–12.
- Tibeout, CM. (1961). An Economic Theory of Fiscal Decentralization. *National Bureau of Economiz Research*. 79-96
- Tonu, D., Badera, I. D. N., & Budiarta, I. K. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Daya Saing Dengan Keserasian Belanja Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(2), 22–32.

- Wahyuningsih, T. (2019). *Ekonomi Publik*. Rajawali Pers.
- Wibowo, Puji (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5, 55-83
- Yulianita, A. (2009). Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 70–85.
- Yunianto, A. D. (2018). *Construction of The Identity of The Gatekeeper on Cikondang Traditional Village*. elibrary.unikom.ac.id